



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO MASA PANDEMI COVID-19 DI
DESA PARDAMEAN SIBISA KECAMATAN AJIBATA**

Intan Novena Sirait

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: Intansrt98@gmail.com

Abstract

Human needs include clothing, food, and shelter. Meeting these needs must do the work because with the increasing needs. Indonesia is one of the countries that face problems of poverty and food insecurity, generally because many people have low incomes. In tackling poverty, the government issued several policies, including one of them is food social assistance, known as the basic food program. Food social assistance has undergone several transformations. In 2020, in order to minimize the impact of covid-19, the government made changes to the instruments in the basic food program, namely the expansion of participation, value of benefits and types of commodities. This study aims to describe the effectiveness of the implementation of the basic food program. Using the theory to measure effectiveness proposed (Budiani, 2007) namely target accuracy, socialization program, program objectives and program monitoring. There were 9 informants in this study consisting of 5 Beneficiary Families, 1 assistance assistant, 1 village head and 2 community members who did not receive assistance. The results obtained from this study indicate that the implementation of the basic food program during the covid-19 pandemic has not been effective, as seen from: targeting accuracy is described as less effective, socialization is described as effective, program objectives are quite effective and monitoring is programless. There are supporting factors in the implementation of this program, namely the availability of e-warong equipped with supporting facilities and the inhibiting factor is that there is only 1 e-warong available for 9 villages and 1 kelurahan with villages that can be said to be quite far from Ajibata District.

Keywords: Food, Poverty, Effectiveness, Basic food program.

Abstrak

Kebutuhan manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Memenuhi kebutuhan tersebut harus melakukan pekerjaan karena dengan semakin meningkatnya kebutuhan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, umumnya karena banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk salah satunya adalah bantuan sosial pangan yang dikenal dengan program sembako. Bantuan sosial pangan beberapa kali mengalami transformasi. Pada tahun 2020 dalam rangka meminimalkan dampak covid-19, pemerintah melakukan perubahan instrumen dalam program sembako yaitu perluasan kepesertaan, nilai manfaat dan jenis komoditi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keefektifan dari pelaksanaan program sembako. Menggunakan teori untuk mengukur efektivitas yang dikemukakan dalam (Budiani, 2007) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Informan dalam penelitian ini ada 9 orang yang terdiri dari 5 orang Keluarga Penerima Manfaat, 1 orang pendamping bantuan, 1 orang



kepala desa dan 2 orang masyarakat yang tidak menerima bantuan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program sembako pada masa pandemi covid-19 belum efektif dilihat dari: ketepatan sasaran digambarkan kurang efektif, sosialisasi digambarkan efektif, tujuan program cukup efektif dan pemantauan program kurang efektif. Adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini yaitu tersedianya e-warong yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung dan faktor penghambatnya yaitu hanya tersedia 1 e-warong untuk 9 desa dan 1 kelurahan dengan desa-desa yang dapat dikatakan jarak tempuh yang cukup jauh dari Kecamatan Ajibata..

Kata Kunci: Pangan, Kemiskinan, Efektivitas, Program Sembako.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu kondisi kompleks yang sangat memprihatikan mencakup kehidupan dari masyarakat. Masalah kemiskinan dirasakan oleh masyarakat yang berada di kelas bawah (*low class*). Kemiskinan juga cenderung dianggap sebagai suatu masalah saat mana kebutuhan manusia semakin meningkat karena secara sederhana ini logis dimana pendapatan dengan kebutuhan tidak seimbang. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, umumnya karena banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu hal yang menandai kemiskinan yaitu dari kurangnya bahan pangan (makanan) dari segi kuantitas maupun kualitas (gizi). Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menunjang berjalannya aktivitas manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang, yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GBKM). Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perhari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 74,92 persen (BPS Sumatera Utara, 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Bab IV pasal 19 tentang kesejahteraan sosial bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga dibutuhkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan pemerintah merealisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan beragam dari bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dan sembako, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan program lainnya. Salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah yaitu dalam bentuk pangan. Bantuan sosial pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Bantuan pangan mengalami beberapa transformasi seperti pada awalnya dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) ditujukan untuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yang dilaksanakan oleh BULOG dengan menyediakan 10 kilogram beras kualitas sedang setiap bulan bagi rumah tangga dengan tingkat harga subsidi Rp 1.000 per kilogram. Kemudian perubahan menjadi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) pada tahun 2002 bertujuan untuk lebih mempertajam ketepatan sasaran penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk beras. Kemudian berganti menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram setiap bulannya. Tahun 2019 berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai yang



dimana dapat diharapkan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan dengan nutrisi yang seimbang dan diberikan tepat sasaran dan waktu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanya untuk dibelanjakan beras dan telur di e-warong.

Pada tahun 2020 mengalami transformasi kembali menjadi Program Sembako. Program Sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi serta memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dengan berubahnya bantuan sosial pangan ini, pada saat itu adanya wabah penyakit global yaitu pandemi covid-19 pada akhir tahun 2019 yang bermula dari Cina dan meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Terkonfirmasi di Indonesia sejak awal Maret 2020 yang begitu berdampak pada sektor kehidupan salah satunya sektor ekonomi sosial. Menurut catatan penelitian Smeru No.2/2020 covid-19 ini diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi (Catatan Penelitian Smeru No.2, 2020).

Dengan terbitnya Perpu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Adanya perubahan tambahan alokasi jaring pengaman sosial untuk menanggulangi covid-19 di dalam Program Sembako (Kelompok Kerja Bantuan Sosial dan Unit Riset,TNP2K, 2020). Perubahan sebelum dan sesudah pandemi covid-19 diterapkan dalam tabel berikut

Tabel 1. Perubahan Program Sembako Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19, 2020

Program	Komponen	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Program Sembako	Sasaran	15,2 jt keluarga	20 jt keluarga	4,8 jt keluarga
	Nilai Manfaat	Rp150.000/bulan	Rp200.000/bulan	Rp50.000/bulan
	Anggaran	Rp 27.4 Triliun	Rp43,6 Triliun	Rp15,5 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Kabinet Terbatas, 7 April 2020), Kementerian Sosial (Bahan Ratas 13 April 2020)

Selain perubahan dari segi sasaran dengan penambahan kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan nilai manfaat, Program Sembako juga menambah adanya jenis komoditi pangan yang tersedia bukan hanya beras dan telur, tetapi sudah dapat membelanjakan bahan pangan yang tersedia seperti sumber karbohidrat (beras, jagung pipilan, sagu), protein hewani (telur,daging ayam,daging sapi, ikan segar), protein nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe), sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur, buah-buahan). Bahan pangan tersebut dibelanjakan di e-warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan nilai manfaat yang ditransfer setiap bulannya ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa dari hasil penelitian yang menyatakan masih kurangnya penerapan aturan sesuai yang ditetapkan dalam pedoman Program Sembako seperti dalam catatan penelitian Smeru No.2/2020 yang praktiknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus mengambil bantuan dalam bentuk paket yang ditentukan pelaksana program tingkat kabupaten/kota, di e-warong tertentu dalam satu kali pengambilan. Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang dimana Keluarga



Penerima Manfaat (KPM) dapat menentukan pilihan atas barang yang dibeli sekitar 14 persen sedangkan 86 persen lainnya menyatakan tidak dapat menentukan (Kelompok Kerja Bantuan Sosial dan Unit Riset, TNP2K, 2020). Hasil pengamatan yang penulis dapatkan dari pra penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan Program Sembako pada masa pandemi covid-19 seperti perluasan kepesertaan yang bertambah tidak sesuai sasaran dengan data yang langsung ditetapkan dari Dinas Sosial. Adanya terjadi di lapangan seperti saldo kosong sehingga menghambat pencairan sembako pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam beberapa bulannya dan bahan sembako yang disalurkan dalam bentuk paket dalam masa pandemi covid-19.

Salah satu wilayah pelaksanaan penyaluran bantuan sembako yaitu di Kabupaten Toba Kecamatan Ajibata. Kecamatan Ajibata terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Untuk penyiapan e-warong yang dapat diakses dalam mencairkan bahan sembako hanya tersedia 1 e-warong untuk satu Kecamatan Ajibata yang terletak di Desa Ajibata. Lokasi penelitian ini terletak di salah satu desa di Kecamatan Ajibata yaitu Desa Pardamean Sibisa yang terletak 9,00 kilometer ke ibukota Kecamatan dengan transportasi yang terbatas. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pardamean Sibisa sebanyak 37 keluarga dengan keterangan perluasan kepesertaan pada bulan April 2020 karena adanya penambahan kepesertaan pada masa pandemi covid-19. Pengamatan saat di e-warong dalam melayani 9 desa dan 1 kelurahan, pihak e-warong pada masa pandemi covid-19 membuat batas waktu atau *deadline* selama seminggu dalam mengambil bahan sembako terkhusus bagi desa yang memiliki jarak jauh dari e-warong dengan tetap menjaga kesegaran bahan sembako. Teknis pengambilan bahan sembako pada saat di e-warong juga dengan menggunakan nomor antrian kemudian saat gilirannya dilakukan pengecekan pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk melihat saldo agar dapat dibelanjakan, dan bahan sembako yang dapat diambil secara langsung karena sudah dipaketkan dari e-warongnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian yang diteliti penulis bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan program sembako dalam pandemi serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program sembako tersebut.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data terkait permasalahan atau objek di dalam penelitian. Informan di dalam penelitian ini ditentukan penulis dengan kondisi tidak ada data yang jelas mengenai besaran populasi dalam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan atau bisa disebut dengan teknik penarikan sampel bola salju (snow ball). Informan pada penelitian berjumlah 9 orang diantaranya 2 orang menjadi informan kunci, 5 orang informan utama dan 2 orang informan tambahan dalam memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder di dapat dari sumber kepustakaan seperti menelaah buku, dokumen, jurnal yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dimana mengkaji data yang ditelaah dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusun dalam satu kesatuan dari data yang didapat baik data primer dan



sekunder, kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, memeriksa keabsahan data serta mendefinisikan dengan analisis sesuai kemampuan daya peneliti sehingga dapat menarik kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketepatan sasaran program

Salah satu indikator dalam melihat efektivitas dalam pelaksanaan program yaitu ketepatan sasaran program. Dalam Budiani (2007) menggambarkan ketepatan sasaran program dengan melihat sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagi setiap keluarga yang menerima bantuan sembako melihat pada pedoman program sembako dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan dengan ditambah terdampak covid-19. Hasil penelitian yang didapat dari wawancara secara langsung dengan informan kunci, informan utama dan informan tambahan bahwa untuk data-data keluarga yang menerima bantuan sembako langsung ditetapkan dari Dinas Sosial sehingga belum relate dengan kondisi masyarakat di lapangan. Informasi yang didapat dari informan kunci bahwa data-data nama yang menerima bantuan baik dari salah satunya program sembako langsung dari camat yang dikeluarkan dari Dinas Sosial yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemuktahiran DTKS oleh Pemda seharusnya dilakukan setiap enam bulan pada awal dan pertengahan tahun, tetapi hal ini bervariasi antar wilayah karena tergantung pada dukungan masing-masing Pemda. Sehingga data yang kurang tepat sasaran karena indikasi kurang validnya atau tidak sesuai dengan hasil pemuktahiran dan masih menggunakan data lama yang mengakibatkan kondisi tidak sama dengan kondisi di lapangan. Hasil dari observasi yaitu hasil pengamatan dari peneliti bahwa ada beberapa yang sudah tepat sasaran dan ada yang kurang tepat.

2. Sosialisasi program

Dalam Budiani (2007) dikemukakan bahwa sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya dalam panduan program sembako bahwa Sosialisasi program sembako merupakan tugas bersama atau koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan tenaga pelaksana Bansos Pangan dengan tujuan agar informasi mengenai program sembako seperti kebijakan dan tujuan program sembako, prinsip pelaksanaan program sembako, mekanisme pelaksanaan, produk dan tata cara penggunaan KKS, tata cara pengaduan dan pentingnya pemenuhan gizi dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sosialisasi dapat dilakukan melalui perangkat media seperti surat yang dikirimkan kepada kepala daerah, pedoman umum program sembako, poster, siaran pers, media daring, pertemuan dengan protokol kesehatan. Hasil penelitian dari hasil observasi peneliti bahwa salah satu pendukung yang membantu menyampaikan informasi terkait program sembako yaitu adanya poster yang isinya terkait mekanisme program sembako, bahan pangan sembako serta nilai manfaat dari program sembako dan simbol logo dari program sembako yang disediakan di e-warong untuk diketahui oleh masyarakat umum dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara bersama informan kunci II yang merupakan pendamping dari program sembako kecamatan mengatakan bahwa untuk sosialisasi ada dilakukan secara pertemuan sebelum pandemi covid-19 dan di masa pandemi covid-19 adanya buku pedoman yang tersedia bagi pendamping untuk mengarahkan dan mendampingi KPM. Sosialisasi juga pernah dilakukan pada saat pengambilan bahan



sembako pertama kali pada perluasan kepesertaan yang bertempat di depan e-warong dengan dihadiri dari tingkat Dinas Sosial dan Bank Penyalur. Informan 1 sebagai kepala desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Pardamean Sibisa dengan perangkat desa melakukan door to door dengan sekalian memberitahu bahwa keluarga tersebut terdata sebagai penerima sembako. Wawancara bersama 5 informan utama yaitu KPM sosialisasi juga dilakukan pada saat pembuatan KKS di kantor camat memberitahukan mekanisme program sembako. Informan tambahan dalam penelitian ini yang berstatus tidak menerima bantuan sembako mengatakan bahwa mengetahui adanya program sembako dan adanya perluasan untuk meminimalkan keluarga yang terdampak akibat covid-19. Disimpulkan bahwa sosialisasi pada masa pandemi covid-19 ini efektif dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Tujuan program

Tujuan program adalah sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang ditetapkan sebelumnya (dalam Budiani 2007). Adapun tujuan program sembako adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Dari hasil wawancara peneliti dan informan, untuk informan utama yang dengan keterangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada umumnya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu, buruh tani yang bekerja di lahan orang lain dan ibu rumah tangga. Program sembako ini bergerak pada bidang pangan, yang dapat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya dalam pemenuhan pangan. Dari informan utama mengatakan bahwa program ini membantu dalam mengurangi pengeluaran ditengah-tengah kondisi pandemi dengan penghasilan yang tidak menentu, dengan nilai manfaat sembako yang disalurkan setiap bulannya berjumlah Rp 200.000. Wawancara dengan informan utama juga mengatakan bahwa penyaluran setiap bulannya tidak berjalan dengan lancar dan disalurkan dibulan berikutnya, meskipun demikian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat terbantu oleh program sembako tersebut.

2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

Salah satu manfaat dari program sembako yaitu mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (PHK). Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan menjaga kecukupan gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahan pangan yang terdiri dari sumber karbohidrat (beras, jagung pipilan, sagu), protein hewani (telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar), protein nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan).

3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi

Dalam ketepatan sasaran yaitu masyarakat yang ekonominya rendah di daerah pelaksanaan. Ketepatan sasaran sebagaimana sudah dibahas di poin nomor satu. Efektifnya untuk waktu penyaluran itu setiap bulannya pada minggu kedua, namun dilapangan ditemui masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terlambat penyaluran dana sembakonya. Meningkatkan dalam hal jumlah, harga dan kualitas dengan memberikan jenis komoditas pangan yang baik dengan gizi seimbang dan pengambilan sembako sesuai dengan dana sembako Rp 200.000 sesuai dengan jumlah bahan pangan (Keluarga Penerima Manfaat hanya diperbolehkan menukar seputar bahan sembako). Hal administrasi dengan adanya data nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang



dipergunakan pada saat penyaluran bahan sembako, dan tentunya dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberi keleluasaan dalam memilih bahan pangan, namun dari hasil wawancara dan observasi bahwa pengambilan bahan sembako dari e-warong sudah dalam bentuk dipaketkan, sehingga pada saat administrasi saldo, makanya bahan sembako yang sudah dipaketkan langsung diberi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

4. Pemantauan Program

Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program sembako pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin/berkala atau sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan rutin melalui dashboard, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa untuk pemantuan secara langsung dari penyelenggara tidak ada, melainkan pada saat ditemui masalah dalam penyaluran saat saldo kosong, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diarahkan untuk melapor kepada pendamping bantuan, kemudian pendamping bantuan memberi laporan melalui grup Whatsaap dengan mengirimkan nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan lampiran foto Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Seharusnya penyelenggara bantuan dapat memantau secara rutin dan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengetahui dampak yang dirasakan dan kendala yang dialami dalam penyaluran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Sembako

Adanya faktor pendukung yaitu dengan adanya e-warong menjadi suatu tempat untuk transaksi bahan sembako yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam hal penyaluran yang dilengkapi dengan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan kekuatan sinyal yang mendukung. Serta semangat yang tinggi dari masyarakat yang menerima bantuan sembako dalam hal partisipasi pengambilan bahan sembako. Namun ada juga yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan program sembako ini yaitu hanya tersedia satu e-warong yang dapat diakses oleh sembilan desa dan satu kelurahan dalam satu kecamatan. Sehingga terkhusus desa yang menjadi lokasi penelitian didapati dari wawancara dan observasi bahwa hal tersebut menjadi salah satu kendala dengan terbatasnya transportasi di desa tersebut.

Kesimpulan

Program sembako ini merupakan bantuan sosial pangan yang beberapa kali mengalami transformasi dengan melihat keefektifan. Di tahun 2020 berubah menjadi Program Sembako dengan perubahan secara sasaran yang bertambah, nilai manfaat untuk meminimalkan dampak covid-19. Dalam pelaksanaan di masa pandemi covid-19 diketahui secara indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu: (1) ketepatan sasaran masih dinilai kurang efektif dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak masih ada yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan pemuktahiran data yang belum dilakukan sehingga memakai data nama yang lama. (2) sosialisasi program digambarkan sudah efektif terlihat dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui mekanisme pelaksanaan program sembako dan masyarakat pada umumnya juga mengetahui adanya program sembako. (3) tujuan program digambarkan kurang efektif terlihat dari poin nomor 4 tujuan sembako dalam hal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberi kebebasan dalam memilih bahan



sembako belum terealisasi dengan aturan yang ada di pedoman, karena yang terjadi di masa pandemi covid-19 ini adanya pemaketan bahan sembako, dan dari segi meningkatkan waktu belum terealisasi dengan baik karena masih adanya terhambatnya waktu penyaluran. (4) pemantauan program digambarkan kurang efektif karena realisasi pemantauan tidak dilakukan secara rutin dan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan program sembako yaitu adanya tempat transaksi e-warong yang memadai pada saat penyaluran, namun ada juga faktor penghambat yaitu hanya tersedianya satu e-warong yang dapat diakses oleh satu kecamatan dengan 9 desa dan 1 kelurahan. Saran kedepannya mengenai penelitian yaitu sebagai referensi bagi pemerintah dan pendamping bantuan lebih berkoordinasi mengenai data Keluarga Penerima Manfaat agar lebih dilihat dari lapangan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memperbaharui data-data Keluarga Penerima Manfaat. Meningkatkan sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sembako pada masa pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

- Adi, I.R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemerdaya Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik Indonesia.2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Budiani, N.W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengganguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*.Vol 2 Nomor 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>
- Fahrudin, A. (2012).*Pengantar Kesejahteraan Sosial*.Bandung : PT. Rafika Aditama
- Hastuti, Ruhmaniyati, Widyaningsih, D . (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19 <https://smeru.or.id/sites/default/files/punlication/cp02.covidpkhin.pdf> diakses pada 21:49 tanggal 10 maret 2021
- Kelompok Kerja Bantuan Sosial dan Unit Riset. TNP2K. (2020). *Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta, Indonesia. <http://tnp2k.go.id/download/91955Memaksimalkan%20Peran%20Sembako.pdf> diakses pada pukul 21:51
- Pedoman Umum Program Sembako.(2020).Jakarta; Kementerian Sosial.<https://kemensos.go.id>
- Perum Bulog.(n.d) *Kajian Raskin/Rastra*. Jakarta Selatan. <http://www.bulog.co.id> diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Thalia, W. (2020). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Program Studi Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id>